

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

Dian Pitra Amalia¹, Muchriana Muchran², Muhammad Nasrun³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹dianputriamalia@gmail.com, ²muchranmuchriana@gmail.com,

³mnasrun@unismuh.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and the Internal Control System (SPIP) in managing government financial reports is crucial. Government financial reports must meet qualitative characteristics: relevance, reliability, comparability, and understandability. This study aims to examine the influence of the Regional Financial Accounting System and the Internal Control System on the Quality of Government Financial Reports at the Parepare City Regional Finance Agency (BKD). This study employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of employees at the Parepare City Regional Finance Agency, with a purposive sampling method yielding 36 respondents directly involved in financial management. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS 26. The results indicate that: (1) the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the Quality of Government Financial Reports; (2) the Internal Control System has a positive and significant effect on the Quality of Government Financial Reports; and (3) simultaneously, the Regional Financial Accounting System and the Internal Control System have a positive and significant effect on the Quality of Government Financial Reports at the Parepare City Government. These findings confirm that a well-implemented accounting system and robust internal controls are essential determinants of high-quality governmental financial reporting.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Internal Control System, Quality of Government Financial Reports

ABSTRAK

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi adalah pegawai BKD Kota Parepare, dengan teknik purposive sampling diperoleh 36 responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis

menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah; (2) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah; dan (3) secara simultan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa sistem akuntansi yang baik dan pengendalian intern yang kuat merupakan faktor penentu utama kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

A. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat dalam era otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik berkewajiban menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri sekaligus akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban ini, sistem informasi keuangan yang andal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penerapan SAKD yang efektif diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Di samping SAKD, Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga memegang peran krusial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI merupakan proses yang terintegrasi dalam setiap kegiatan organisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPI yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar laporan keuangan dapat disusun dengan benar, tepat waktu, dan memenuhi standar yang berlaku.

Kota Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, meskipun opini WTP telah diraih, masih terdapat indikasi bahwa implementasi SAKD

dan SPIP belum optimal. Hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern serta perlunya peningkatan dalam penatausahaan dan penyajian laporan keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perolehan opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh SAKD dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Sri Dewi Anggadini et al. (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih (2022) menyimpulkan bahwa secara simultan penerapan SAKD, kompetensi SDM, SPI, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maslina (2024) juga menemukan bahwa sistem keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare; (2) menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare; dan (3) menganalisis pengaruh secara simultan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud menguji hipotesis mengenai hubungan antarvariabel yang diukur menggunakan data numerik dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2010). Penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Parepare pada bulan Januari hingga Februari 2026.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di BKD Kota Parepare. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 36 responden.

Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian: pengukuran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dengan 7 indikator (pencatatan, penggolongan, dan pelaporan); pengukuran Sistem Pengendalian Intern (X2) dengan 10 indikator (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan); dan pengukuran Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan 8 indikator (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami).

Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) Uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas); (2) Uji asumsi klasik (uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji

multikolinearitas dengan VIF, dan uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot dan Glejser); serta (3) Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji statistik t (parsial), uji statistik F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Persamaan regresi yang digunakan adalah: $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, di mana Y = Kualitas Laporan Keuangan, X_1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, X_2 = Sistem Pengendalian Intern, dan e = error. Seluruh analisis dilakukan menggunakan software SPSS versi 26.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Responden

Dari 36 kuesioner yang disebarkan, seluruhnya kembali dan dapat digunakan (tingkat respons 100%). Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar adalah perempuan (55,6%) dengan usia antara 31-40 tahun (44,4%). Tingkat pendidikan responden didominasi sarjana S1 (72,2%), dan sebagian besar telah bekerja lebih dari 5 tahun (66,7%). Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata skor variabel SAKD sebesar 33,17 (dari skor maksimal 35), SPI sebesar 45,97 (dari

skor maksimal 50), dan Kualitas LKP sebesar 38,14 (dari skor maksimal 40), yang mengindikasikan persepsi responden yang sangat positif terhadap ketiga variabel penelitian.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel ($n=36$, $\alpha=5\%$, r tabel = 0,329). Seluruh item pernyataan pada ketiga variabel menghasilkan nilai r hitung > r tabel, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa variabel SAKD ($\alpha = 0,892$), SPI ($\alpha = 0,916$), dan Kualitas LKP ($\alpha = 0,879$) seluruhnya berada di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance untuk SAKD = 0,482 dan SPI = 0,482, serta nilai VIF masing-masing = 2,075 < 10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi SAKD = 0,214 dan SPI = 0,321, keduanya >

0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, model regresi dinyatakan layak digunakan.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan: $Y = 3,456 + 0,512X_1 + 0,387X_2 + e$. Persamaan ini menunjukkan bahwa konstanta sebesar 3,456 berarti jika SAKD dan SPI bernilai 0, kualitas laporan keuangan memiliki nilai sebesar 3,456. Koefisien $\beta_1 = 0,512$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SAKD akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,512 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien $\beta_2 = 0,387$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SPI akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,387 satuan.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta	3,456	1,234	2,801	0,008
SAKD (X_1)	0,512	0,118	4,339	0,000
SPI (X_2)	0,387	0,094	4,117	0,000

5. Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t (Parsial). Variabel SAKD menghasilkan nilai t hitung = $4,339 > t \text{ tabel } (df=33, \alpha=5\%) = 2,035$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H1 diterima: SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Variabel SPI menghasilkan nilai t hitung = $4,117 > t \text{ tabel } = 2,035$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H2 diterima: SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Uji Statistik F (Simultan). Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung = $47,823 > F \text{ tabel } (df_1=2, df_2=33) = 3,28$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H3 diterima: secara simultan SAKD dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	F hitung	Sig.
Regression	121,456	2	47,823	0,000
Residual	41,877	33	-	-
Total	163,333	35	-	-

Koefisien Determinasi. Nilai $R^2 = 0,743$ menunjukkan bahwa 74,3% variasi kualitas laporan keuangan

pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel SAKD dan SPI, sedangkan sisanya 25,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

6. Pembahasan

Pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ($t = 4,339$; $\text{sig} = 0,000$). Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang dikemukakan Mardiasmo (2009) bahwa penerapan sistem akuntansi yang efektif mencerminkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya publik. Semakin baik penerapan SAKD, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

SAKD yang mencakup prosedur pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis memungkinkan tersedianya informasi keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), SAKD berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mereduksi asimetri informasi

antara pemerintah (agent) dan masyarakat (principal). Hasil ini konsisten dengan penelitian Satriani binti Ansar (2018), Saskia Auliyah Yusri (2024), dan Febriana Nafi'ah Vidyasari (2021) yang menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ($t = 4,117$; $\text{sig} = 0,000$). Temuan ini mendukung teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) yang menekankan bahwa pengelola (*government steward*) yang bertindak jujur dan transparan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. SPI yang mencakup lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berperan sebagai *safeguard* untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan.

Lingkungan pengendalian yang baik menciptakan budaya organisasi yang peduli terhadap akurasi

informasi keuangan. Penilaian risiko yang komprehensif membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dalam penyusunan laporan. Kegiatan pengendalian memastikan bahwa setiap transaksi diotorisasi dan didokumentasikan dengan benar. Sistem informasi dan komunikasi yang efektif memastikan data keuangan tersedia tepat waktu, sedangkan pemantauan berkelanjutan menjaga agar sistem pengendalian tetap berfungsi optimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Silsy Fadya et al. (2024), BRM. Suryo Triono et al. (2020), serta Sri Dewi Anggadini et al. (2021) yang menemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Simultan SAKD dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan SAKD dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ($F = 47,823$; $\text{sig} = 0,000$). Koefisien determinasi $R^2 = 0,743$ mengindikasikan bahwa SAKD dan SPI bersama-sama mampu menjelaskan 74,3% variasi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan kontribusi yang besar

dari kedua sistem tersebut dalam memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa SAKD dan SPI merupakan dua pilar yang saling melengkapi dan bersinergi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. SAKD menyediakan kerangka prosedural untuk menghasilkan informasi keuangan yang sistematis dan terstandarisasi, sementara SPI berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dijalankan dengan benar dan konsisten. Keduanya secara bersama-sama membentuk fondasi tata kelola keuangan yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Via Amaria et al. (2023), Maslina (2024), dan Enita Binawati et al. (2022) yang menemukan pengaruh simultan kedua variabel tersebut.

Implikasi praktis dari temuan ini bagi Pemerintah Kota Parepare adalah perlunya penguatan implementasi SAKD melalui peningkatan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi pemerintahan,

pemutakhiran sistem informasi keuangan berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas SPI melalui evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian yang ada. Meskipun BKD Kota Parepare telah berhasil mempertahankan opini WTP, upaya peningkatan kualitas SAKD dan SPI secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 4,339 > t tabel = 2,035 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya, semakin baik penerapan SAKD, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kedua, Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 4,117 > t tabel = 2,035 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Ketiga,

secara simultan SAKD dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare, dibuktikan dengan nilai F hitung = 47,823 > F tabel = 3,28 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai $R^2 = 0,743$.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar: (1) Pemerintah Kota Parepare memperkuat penerapan SAKD melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan dan pemutakhiran sistem informasi keuangan; (2) Badan Keuangan Daerah Kota Parepare meningkatkan efektivitas SPI melalui evaluasi berkala dan tindak lanjut atas temuan kelemahan pengendalian; dan (3) Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menambahkan variabel moderasi seperti kompetensi SDM atau teknologi informasi, serta menggunakan pendekatan mixed-methods untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anggadini, S. D., et al. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Dampak dari Sistem Pengendalian Intern

- dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 115-130.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Fadya, S., et al. (2024). Pengaruh Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. BPR Syariah di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45-58.
- Halim, A., et al. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrayani, K. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 89-104.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Maslina. (2024). Pengaruh Sistem Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 22-37.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 150-165.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 67-80.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1-15.
- Via Amaria, et al. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 30-48.
- Yusri, S. A. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.